

	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	024/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBUK/06/2022
		Tgl. Disahkan	02/06/2021
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Disahkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  CAPT. WISNU RISIANTO, M.M. Pembina (IV/b) 19712020 199808 1 001
PERMOHONAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 6. PM Nomor 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan No. 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera 12. KM.66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 13. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.01/BPSDMP-2013; 14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; 15. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 16. ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan. 		Dilakukan kegiatan Permohonan Pemakaian Kendaraan Dinas sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DOKUMEN INDUK </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
Apabila SOP Permohonan Pemakaian Kendaraan Dinas tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.			

SOP PERMOHONAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.	
		Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	PENGELOLA URUSAN KERUMAHTANGGAAN	PENGEMUDI	USER	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melakukan Permintaan penggunaan kendaraan dinas H-1					FR-SBUK-22 Formulir permohonan peminjaman kendaraan dinas	15 menit	FR-SBUK-22 Formulir permohonan peminjaman kendaraan dinas	
2	Mengatur pembagian driver, kendaraan dinas, membuat surat jalan/ penunjukan driver serta menyampaikan kepada Analisis SDM Aparatur Ahli Muda					Nama-nama Driver dan kendaraan dinas	Setiap Hari	Hasil Pembagian, Surat Jalan/ Surat Penunjukan Driver	
3	Menyetujui permintaan peminjaman kendaraan dinas					FR-SBUK-23 Surat Jalan/ Surat Penunjukan Driver	30 menit	FR-SBUK-23 Surat Jalan/ Surat Penunjukan Driver	
4	Menginformasikan Driver dan kendaraan dinas yang bisa digunakan serta memberikan arahan sebelum menggunakan kendaraan dinas					FR-SBUK-23 Surat Jalan/ Surat Penunjukan Driver	15 menit	FR-SBUK-24 Checklist Pemeriksaan Kendaraan	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PERMOHONAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	<p>Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <p>- Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <p>- Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan</p>	6/23/2022